



PERATURAN KALURAHAN CANDEN  
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

CANDEN, JETIS, BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2024



LURAH CANDEN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN CANDEN  
  
NOMOR 05 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CANDEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Kalurahan Canden tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 2025 sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang di susun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerinah Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Canden tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 681);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Fokus Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1406);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rancana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 07);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 85);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 130);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);

32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 tahun 2024 tentang Standararisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2025 (berita daerah kabupaten Bantul tahun 2024 nomor 64);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (berita daerah kabupaten Bantul tahun 2024 nomor 52);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2024 tentang Pencabutan 5 (Lima) Peraturan Bupati Bantul (berita daerah kabupaten Bantul tahun 2024 nomor 59);
35. Peraturan Desa Canden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Musyawarah Desa (Lembaran Desa Canden Tahun 2020 Nomor 19);
36. Peraturan Desa Canden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa Canden (Lembaran Desa Canden Tahun 2020 Nomor 21);
37. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Canden (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2020 Nomor 24);
38. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Canden (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2020 Nomor 25);
39. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) Canden Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2021 Nomor 04);
40. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Canden Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2024 Nomor 02);
41. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Canden Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2024 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDEN  
dan  
LURAH CANDEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN CANDEN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan  
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	4.781.569.736,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	5.011.896.488,00
Surplus / (Defisit)	Rp	(230.326.752,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp	230.326.752,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana  
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 memuat

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Canden tentang Penjabaran Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Canden sebagai landasan operasional  
pelaksanaan APB Kalurahan.



## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan spasial; dan
  - e. Berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Canden Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Canden  
pada tanggal 31 Desember 2024  
LURAH CANDEN,

TTd

BEJA

Diundangkan di Canden  
pada tanggal 31 Desember 2024  
CARIK CANDEN,

TTd

PURWAKA NUGRAHA

LEMBARAN KALURAHAN CANDEN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024 NOMOR 05  
NOREG. PERATURAN KALURAHAN CANDEN KAPANEWON JETIS KABUPATEN  
BANTUL : (05/CANDEN/2024)

salinan Sesuai dengan Aslinya,  
a.n Carik Canden

